



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINDI WINARSO

2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT STRATEGI AUDIT DAN KONSULTASI

3. NHK : **434634**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.565.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/144 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/260 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
 HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/147 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.079.000.000

- MOTOR, YAMAHA SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
 75.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000







- MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI 30.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	-		Rp.	313.000.000
D.	SURAT BERHARGA	- N	al.	Rp.	at at
E.	KAS DAN SETARA KAS	M	NA	Rp.	1.200.103.788
F.	HARTA LAINNYA	all .	all .	Rp.	al al
PI	Sub Total	KPA	KON	Rp.	6.157.103.788
III. HUTANG		Rp.	993.373.784		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	5.163.730 <mark>.00</mark> 4	

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.